



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Kinerja Aparat Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Sri Magvira Y. Tilola^a, Harun Blongkod^b, Mentari Rizki Sawitri Pilomonu^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: viratilola171@gmail.com^a, blongkod@ung.ac.id^b, mentari@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 04-06-2026

Revised 08-08-2026

Accepted 12-08-2026

Kata Kunci:

Sistem Informasi
Pemerintah Daerah,
Kinerja Aparat
Pemerintah, Kualitas
Laporan Keuangan

Keywords:

*Regional Government
Information System,
Government Official
Performance,
Financial Report Quality*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kinerja aparat pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 227 pegawai pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, sedangkan sampel penelitian sebanyak 102 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SIPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, Penerapan SIPD dan Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar 81,3 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem informasi belum cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan apabila tidak didukung oleh kompetensi dan kinerja sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Regional Government Information System (SIPD) implementation and government official performance on the quality of financial reports at the Regional Apparatus Organization (OPD) of the Gorontalo Provincial Finance Agency. This study used a quantitative approach with a survey method. The population consisted of 227 employees at the Gorontalo Provincial Finance Agency, while the sample consisted of 102 respondents determined through purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with the AMOS program. The results indicate that SIPD implementation does not significantly affect financial report quality, whereas government official performance has a positive and significant effect. Simultaneously, SIPD implementation and government official performance affect financial report quality with a contribution of 81.3 percent. These findings indicate that an information system alone is not sufficient to improve financial report quality unless supported by

the competence and performance of the human resources operating it.

@2026 Sri Magvira Y. Tilola, Harun Blongkod, Mentari R. S. Pilomonu
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah terus diperbarui untuk mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh pedoman teknis terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kepada pemerintah pusat melalui laporan APBD serta laporan keuangan lainnya yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada DPRD, sehingga harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami (Blongkod et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pegawai Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, terungkap bahwa pemerintah provinsi masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangannya, di antaranya kesalahan pencatatan, ketidaksinkronan data antara tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, ketidaklengkapan dokumen pendukung, inkonsistensi penerapan SAP antarbidang, serta lemahnya proses verifikasi internal. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat verifiability, comparability, dan reliability laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern turut menguatkan bahwa proses penyusunan laporan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari dua faktor utama, yaitu efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan kinerja aparat pemerintah yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. SIPD pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala, terutama pada proses sinkronisasi dan konsolidasi data dari tahap penganggaran hingga administrasi keuangan, yang diperparah oleh keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Di sisi lain, adanya perbedaan capaian kinerja antarbidang di Badan Keuangan di mana sebagian bidang mampu menghasilkan laporan berkualitas sementara bidang lain masih terkendala menunjukkan adanya kesenjangan penerapan sistem dan kinerja aparat di internal instansi tersebut.

Kesenjangan inilah yang mendorong peneliti untuk menguji pengaruh penerapan SIPD dan kinerja aparat pemerintah secara spesifik terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu: (1) apakah penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan; (2) apakah kinerja aparat pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan; dan (3) apakah penerapan SIPD dan kinerja aparat pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketiga hubungan tersebut, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan akuntansi sektor publik dan kontribusi praktis bagi pimpinan OPD dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini didasarkan pada Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menguraikan hubungan kontraktual antara pihak pemberi mandat (principal) dan pihak penerima mandat (agent). Dalam sektor publik, masyarakat, DPRD, serta pemerintah pusat berperan sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agent yang memperoleh kewenangan mengelola sumber daya publik. Relasi ini berpotensi menimbulkan information asymmetry antara pihak yang mengelola dan pihak yang memberi mandat, sehingga laporan keuangan yang berkualitas menjadi sarana utama untuk menekan asimetri informasi sekaligus mengurangi risiko moral hazard.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara konseptual, SIPD berperan sebagai instrumen pengendalian administratif dan teknis yang menyatukan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah dalam satu sistem terpadu, sehingga mendukung konsistensi data, ketepatan waktu penyajian informasi, dan meminimalkan kesalahan pencatatan.

Kinerja Aparat Pemerintah

Kinerja aparat pemerintah menggambarkan sejauh mana tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, yang umumnya diukur melalui dimensi responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, dan

kualitas layanan (Restu Agusti, 2015). Aparat yang responsif dan bertanggung jawab cenderung mampu memanfaatkan SIPD secara optimal, mematuhi standar akuntansi, serta menjaga keandalan data keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dikategorikan bermutu apabila memenuhi empat karakteristik utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevan, andal (reliability), dapat dibandingkan (comparability), dan mudah dipahami (understandability).

Perumusan Hipotesis

Penelitian Naida (2024) dan Syamsuddin (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena mampu memperbaiki integrasi data, ketepatan waktu penyajian, serta mengurangi kesalahan pencatatan. Berdasarkan perspektif Agency Theory, penerapan SIPD berperan mengurangi information asymmetry antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal melalui pencatatan yang terintegrasi dan transparan. Dengan demikian, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian Puspitawati et al. (2023) dan Fitriarsi (2024) menemukan bahwa kinerja aparat pemerintah yang meliputi kemampuan teknis, ketelitian, dan kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, karena aparatur merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung dalam proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Dari perspektif Agency Theory, aparat yang berkinerja baik akan menjalankan tugas secara lebih bertanggung jawab dan menyajikan informasi secara jujur dan tepat waktu, sehingga memperkuat mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian Naida et al. (2023) menunjukkan bahwa kombinasi antara sistem informasi pemerintah yang efektif dan kompetensi sumber daya manusia menghasilkan peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih besar dibandingkan pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Teknologi yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan memanfaatkannya secara optimal agar mekanisme keagenan berjalan efektif. Dengan demikian, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal, yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2024). Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Populasi penelitian berjumlah 227 pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada 12 bidang/unit di lingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan SIPD, pengelolaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan, serta memiliki masa kerja minimal satu tahun, sehingga diperoleh sampel sebanyak 102 responden.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu Penerapan SIPD (X1) dan Kinerja Aparat Pemerintah (X2) sebagai variabel independen, serta Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan Skala Likert 1-5, yang disebarakan secara langsung maupun melalui Google Form dan WhatsApp. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan program AMOS, karena SEM mampu menguji hubungan yang kompleks antar variabel secara simultan sekaligus mengevaluasi model pengukuran dan model struktural (Ghozali, 2016). Kesesuaian model (goodness of fit) dievaluasi melalui indikator Chi-Square, Significance Probability ($\geq 0,05$), RMSEA ($\leq 0,08$), GFI dan AGFI ($\geq 0,90$), CMIN/DF ($\leq 2,00$), TLI dan CFI ($\geq 0,90$).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan nilai Critical Ratio (C.R.) sebagai representasi t-value pada taraf signifikansi 0,05. Hipotesis diterima apabila nilai C.R. $\geq 1,660$ atau nilai probabilitas (P) $\leq 0,05$.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Penerapan SIPD, Kinerja Aparat Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas nilai ambang 0,6, yaitu masing-masing sebesar 0,924 untuk variabel Penerapan SIPD, 0,941 untuk variabel Kinerja Aparat Pemerintah, dan 0,941 untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan, sehingga instrumen

penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti (Sunnyoto, 2009).

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Penerapan SIPD

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X ₁)	X _{1.1}	0,614	0,5	Valid
2		X _{1.2}	0,518	0,5	Valid
3		X _{1.3}	0,728	0,5	Valid
4		X _{1.4}	0,728	0,5	Valid
5		X _{1.5}	0,685	0,5	Valid
6		X _{1.6}	0,777	0,5	Valid
7		X _{1.7}	0,809	0,5	Valid
8		X _{1.8}	0,779	0,5	Valid
9		X _{1.9}	0,722	0,5	Valid
10		X _{1.10}	0,741	0,5	Valid
11		X _{1.11}	0,67	0,5	Valid
12		X _{1.12}	0,746	0,5	Valid

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kinerja Aparat Pemerintah

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	Kinerja Aparat Pemerintah X ₂	X2.1	0,8	0,5	Valid
2		X2.2	0,856	0,5	Valid
3		X2.3	0,802	0,5	Valid
4		X2.4	0,811	0,5	Valid
5		X2.5	0,831	0,5	Valid
6		X2.6	0,808	0,5	Valid
7		X2.7	0,78	0,5	Valid
8		X2.8	0,851	0,5	Valid

Sumber: Data diolah kembali

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No.	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Loading Factor	r-kritis	Status Item
1	Kualitas Laporan Keuangan Y	Y.1	0,802	0,5	Valid
2		Y.2	0,769	0,5	Valid
3		Y.3	0,888	0,5	Valid
4		Y.4	0,863	0,5	Valid
5		Y.5	0,856	0,5	Valid
6		Y.6	0,553	0,5	Valid
7		Y.7	0,904	0,5	Valid
8		Y.8	0,86	0,5	Valid

Sumber: Data diolah kembali

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	<i>Alpha Cronbach's</i>	Alpha Toleransi	Status Item
1	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X_1)	0,924	0,6	<i>Realiable</i>
2	Kinerja Aparatur X_2	0,941	0,6	<i>Realiable</i>
3	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,941	0,6	<i>Realiable</i>

Sumber: Data diolah kembali

Hasil Structural Equation Modeling

Uji Prasyarat Analisis SEM

Pengujian prasyarat SEM menunjukkan bahwa jumlah sampel sebanyak 102 responden telah memenuhi syarat kecukupan sampel untuk estimasi Maximum Likelihood, yaitu pada rentang 100–200 responden (Ghozali, 2016).

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

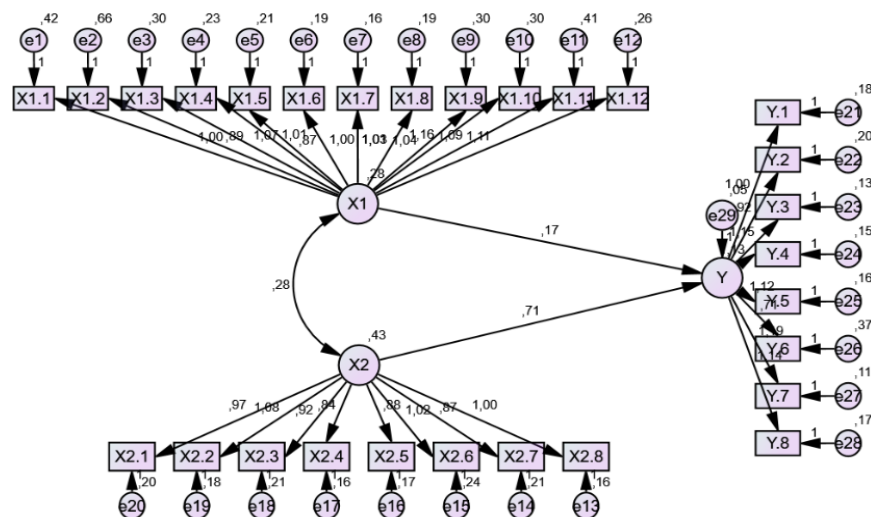
Variabel		Estimate	
X1	<->	X2	0,813

Sumber: Data diolah kembali

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antarvariabel eksogen sebesar 0,813, yang berada di bawah batas 0,9 sehingga model dinyatakan terbebas dari multikolinearitas.

Uji Struktural Equation Modeling (SEM)

Model Awal Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Kinerja Aparat Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada OPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo)



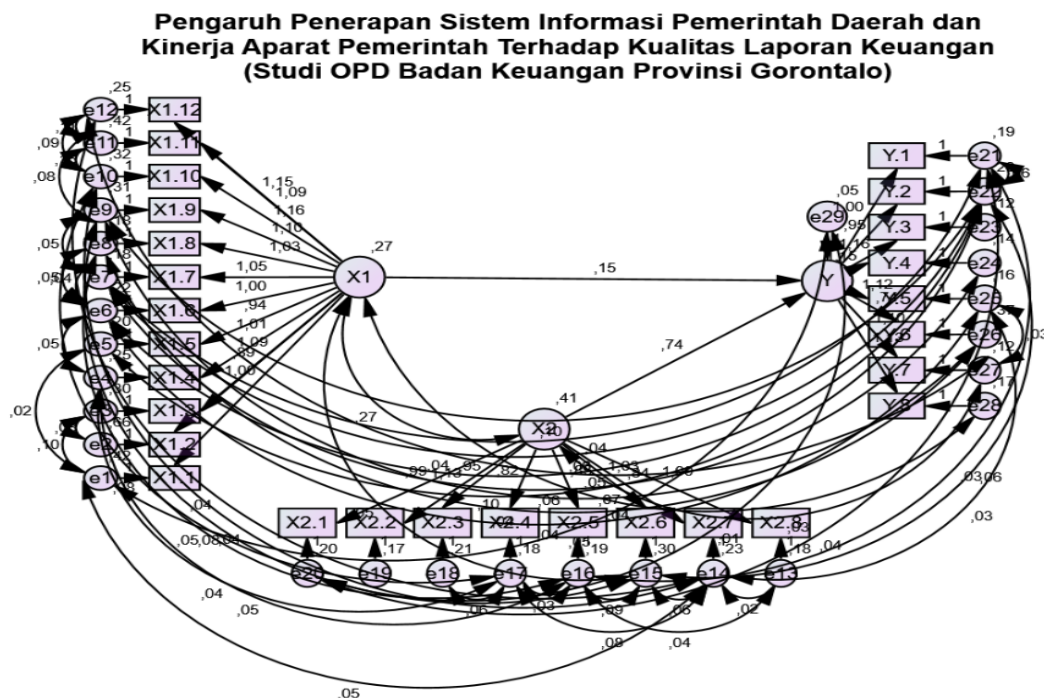
Gambar 1. Hasil Analisis SEM Tahap Awal

Tabel 6. Evaluasi Gfi Model (Uji Tahap Awal)

Goodnes of fit	Cut-Of Value (nilai batas)	Hasil Model	Evaluasi Model
Chi-square	< 56,892	643,473	Bad fit
Significance Probability	$\geq 0,05$	0	Marginal Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,092	Bad Fit
GFI	$\geq 0,90$	0,691	Marginal Fit
AGFI	$\geq 0,90$	0,638	Marginal Fit
TLI	$\geq 0,90$	0,865	Marginal Fit
CFI	$\geq 0,90$	0,876	Marginal Fit
CMIN/DF	$\geq 2,00$	1,854	Marginal Fit

Sumber: Data diolah kembali

Berdasarkan Tabel 6 model belum memenuhi syarat penggunaan karena beberapa kriteria seperti Chi-square, significance Probability, belum sesuai standar, meskipun GFI, AGFI, TLI, CMIN/DF, RMSEA dan CFI hampir memenuhi. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan kolerasi, sesuai petunjuk modification indices, untuk memperbaiki model agar dapat membuktikan hipotesis. Adapun hasil modifikasi sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Analisis SEM Tahap Akhir

Tabel 7. Evaluasi Gfi Model (Uji Tahap Akhir)

Goodnes of fit	Cut-Of Value	Hasil Model	Evaluasi Model
	(nilai batas)		
Chi-square	< 56,892	326,432	Good Fit
<i>Significance Probability</i>	$\geq 0,05$	0	Marginal Fit
RMSEA	$\leq 0,08$	0,03	Marginal Fit
GFI	$\geq 0,90$	0,829	Marginal Fit
AGFI	$\geq 0,90$	0,769	Marginal Fit
TLI	$\geq 0,90$	0,986	Good Fit
CFI	$\geq 0,90$	0,989	Good Fit
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,088	Marginal Fit

Sumber: Data diolah kembali

Berdasarkan tabel 7. dapat disimpulkan bahwa kriteria variabel pada model telah memenuhi semua kriteria Goodness of Fit Indices. Artinya, model ini menunjukkan kesesuaian yang baik dengan data yang ada. Dengan terpenuhinya semua kriteria tersebut, langkah selanjutnya adalah menampilkan nilai koefisien regresi dan critical rasio untuk masing-masing variabel. Informasi ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh dan hubungan antar variabel dalam model yang telah diuji.

Uji Hipotesis

Uji parsial

Tabel 8. Uji parsial

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Kesimpulan
Y	<--- X1	0,172	0,112	1,535	0,125	Tidak Signifikan
Y	<--- X2	0,713	0,109	6,519	***	Signifikan

Sumber: Data diolah kembali

Hasil estimasi Regression Weights menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) memperoleh nilai Critical Ratio sebesar 1,535 dengan probabilitas 0,125, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 ditolak. sedangkan kinerja aparat pemerintah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh nilai Critical Ratio sebesar 6,519 dengan probabilitas 0,000, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima.

Uji simultan

Tabel 9. Uji simultan

Estimate
Kualitas Laporan Keuangan 0,813

Sumber: Data diolah kembali

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,813, yang berarti 81,3% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh sistem informasi pemerintah daerah dan kinerja aparat pemerintah, sedangkan

sisanya 19,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SIPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif Agency Theory, di mana keberadaan SIPD pada dasarnya bertujuan mengurangi agency problem seperti asimetri informasi dan potensi penyimpangan pengelolaan keuangan, namun penggunaan teknologi informasi saja belum cukup untuk meminimalkan masalah keagenan apabila tidak disertai komitmen, integritas, dan kompetensi aparatur pengelola keuangan. Kondisi ini sejalan dengan kendala yang ditemukan di lapangan, yaitu sinkronisasi data yang belum optimal, kesalahan pencatatan, gangguan sistem, serta keterbatasan kemampuan sebagian pegawai dalam mengoperasikan aplikasi SIPD. Temuan ini juga sejalan dengan Teori Institusional yang menjelaskan bahwa penerapan suatu sistem sering kali dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, namun kepatuhan tersebut belum tentu menjamin tercapainya tujuan organisasi apabila implementasinya belum berjalan efektif. Hasil ini konsisten dengan penelitian Firmansyah (2024) dan Bestari dan Wahyuni (2023) yang juga menemukan bahwa keberadaan sistem informasi tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa didukung kompetensi sumber daya manusia.

Pengaruh Kinerja Aparat Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari perspektif Agency Theory, kinerja aparatur yang baik akan mengurangi kemungkinan kesalahan informasi serta meningkatkan kepercayaan principal terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, karena aparat yang responsif, patuh terhadap regulasi, dan teliti cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, relevan, dan tepat waktu. Temuan ini juga sejalan dengan Teori Institusional, yang menjelaskan bahwa kinerja aparat mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan regulasi, termasuk dalam penggunaan SIPD. Hasil ini konsisten dengan penelitian Safira et al. (2025) serta Hidayat dan Azindani (2021) yang menemukan bahwa kinerja aparat pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Simultan Penerapan SIPD dan Kinerja Aparat Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Secara simultan, Penerapan SIPD dan Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 81,3%.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem informasi dan sumber daya manusia merupakan dua komponen yang saling melengkapi: sistem informasi yang baik tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung aparatur yang mampu mengoperasikannya secara efektif, dan sebaliknya, aparatur yang kompeten membutuhkan dukungan sistem informasi yang memadai agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Dari perspektif Agency Theory, kombinasi keduanya mampu menekan risiko asimetri informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Naida et al. (2023) dan Blongkod et al. (2025), yang menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi pemerintah daerah akan memberikan dampak lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan apabila didukung oleh kompetensi dan kinerja sumber daya manusia yang baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo; (2) Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan; dan (3) secara simultan, Penerapan SIPD dan Kinerja Aparat Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 81,3%. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor sumber daya manusia memiliki peran lebih dominan dibandingkan keberadaan sistem informasi semata dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan objek penelitian yang hanya terbatas pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada instansi pemerintah daerah lain, serta penggunaan dua variabel independen sehingga belum menjangkau faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti pengendalian internal atau kompetensi sumber daya manusia secara spesifik.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, disarankan agar Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus meningkatkan optimalisasi penerapan SIPD, terutama pada aspek integrasi data, stabilitas sistem, dan kualitas jaringan internet. Pimpinan OPD juga disarankan meningkatkan kinerja aparat pemerintah melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan terkait penggunaan SIPD dan penyusunan laporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian serta menambahkan variabel lain, seperti pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia, agar diperoleh gambaran

yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163–184. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16995>
- Blongkod, H., et al. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3), 1938–1947. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.7166>
- Firmansyah, T. W. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. *Jumia*, 4(1), 1–23.
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34–54. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.649>
- Ghozali, I. (2016). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Mayanti, I. A., Sukraini, J., & Defitri, S. Y. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 261–280.
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM. *Solusi*, 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10554>
- Naida, N., Amir, A. M., Din, M., A, M. I., & Karim, F. (2023). The Effect of Implementing Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial Reports Moderated by Human Resource Competence. *Journal of World Science*, 2(8), 1123–1129.

<https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.390>

- Puspitawati, L., Liani, D. O., & Yusuf, M. (2023). Performance of Local Government Information System Applications (SIPD) and Internal Control Systems to Improving Quality Financial Reports. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 6(3), 1–13. <https://doi.org/10.34010/icobest.v4i.341>
- Restu Agusti. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, 20(3), 1–15.
- Safira, Murhaban, & Nazaina, I. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPK Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 4(1). <https://doi.org/10.29103/jam.v4i1.19139>
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2009). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Penerbit Medpress.
- Syamsuddin. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan dan Pengaruhnya terhadap Keandalan dan Relevansi Laporan Keuangan.